

Mapolsek Parakan Mulai Dibangun



KR-Istimewa

Kapolres Temanggung siap melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mapolsek Parakan.

TEMANGGUNG (KR) - Pembangunan kantor Polsek Parakan oleh Polres Temanggung dimulai Jumat (5/7), ditandai peletakan batu pertama oleh Kapolres setempat AKBP Ary Sudrajat. Untuk pembangunan mapolsek tersebut, dianggarkan dana Rp 2.739.100.000 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. AKBP Ary Sudrajat mengatakan pembangunan dilaksanakan selama 180 hari kalender. "Akhir tahun 2024, ditargetkan pembangunan selesai dan segera ditempati untuk pelayanan kepada masyarakat. Mohon doanya, semoga pembangunan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Ke depan, Polsek Parakan akan menjadi Polsek termegah di Kabupaten Temanggung dan merupakan Polsek terbesar karena aktivitas masyarakat Parakan yang sangat tinggi," ungkapnya.

Menurut Kapolres, prosesi peletakan batu pertama sebagai simbol awal pembangunan. Semua berharap pembangunan dapat berjalan lancar, bisa tepat waktu dan kualitas. AKBP Ary Sudrajat juga menyebutkan, tahap pembangunan Mapolsek Parakan perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat Parakan khususnya, bahwa untuk sementara pelayanan masyarakat dialihkan.

Direktur CV Bilqis, Berliana Contruction Ahmad Makruf, membenarkan bahwa tanda tangan kontrak telah dilaksanakan 13 Juni 2024. "Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender. Saat ini sudah memasuki minggu ketiga, dengan progres rencana 0,465 persen dan progres realisasi 1,867 persen," jelasnya.

AKBP Ary Sudrajat menambahkan bahwa tahap pembangunan Polsek ini perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat Parakan khususnya bahwa untuk sementara pelayanan masyarakat dialihkan. Apabila ada masyarakat yang akan ada keperluan terkait pelayanan agar bisa menyesuaikan. **(Osy)-f**

PEMKAB SUKOHARJO INGATKAN KADES

Hati-hati Gunakan Dana Desa

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo mengingatkan kepada kepala desa (kades) hati-hati menggunakan dana desa. Monitoring dan pencegahan korupsi terus di giatkan dan penting dilakukan secara menyeluruh.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengingatkan hal itu, Jumat (5/7), dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK-RI Tahun 2024. Menurutnya, monitoring merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah praktik-praktik korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan desa.

"Sebagai lembaga pemerintah, kita harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja terutama pada proses pengadaan barang dan jasa serta penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat," tandas Etik Suryani.

Bupati juga minta kades selalu memberikan pelayanan yang berintegritas, yaitu pelayanan yang mengedepankan kepentingan warga dengan meniadakan jasa atas

layanan yang diberikan. "Karena itu, saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi monitoring KPK-RI Tahun 2024 untuk kepala desa di Kabupaten Sukoharjo," tegasnya.

Bupati juga menyambut baik kegiatan tersebut, mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan sekaligus keprihatinan masyarakat. "Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama dalam pembangunan," tambahnya.

Disebutkan, selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sukoharjo sudah diterjunkan untuk membantu pendampingan dan pengawasan kepada desa. "Juga ada inspektorat yang membantu pengawasan di desa.



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Sukoharjo menyerahkan penghargaan LHKPN Tercepat kepada Kades Gumpang Kartasura.

Karena itu, sekecil apapun pelanggaran dan penyimpangan anggaran harus dihindari," tandas Etik Suryani.

Untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang bebas korupsi, bupati mengajak seluruh jajaran sampai pemerintah desa bersama-sama memberikan komitmen yang sung-

guh-sungguh serta konsisten mencegah korupsi. "Pemerintah desa banyak mendapat bantuan keuangan melalui beberapa sumber, seperti dana desa dan alokasi dana desa. Masih ada lagi bantuan dari pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelasnya. **(Mam)-f**

DI KABUPATEN KARANGANYAR

Bangunan Ilegal Dibongkar Paksa



KR-Abdul Alim

Pembongkaran garasi bangunan ilegal di Karanganyar.

KARANGANYAR (KR) - Bangunan liar di atas saluran irigasi di wilayah Mangreh RT 04 RW XIII Kelurahan Lalung Karanganyar dibongkar paksa aparat gabungan Satpol PP dan UPT Balai Pengelolaan Sumber

Daya Air (PSDA) Jawa Tengah, Kamis (4/7). Bangunan-bangunan itu berupa garasi mobil milik warga perumahan, satu di antaranya milik pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Pembongkaran dikerjakan satu unit ekskavator dan dibantu 50 personel gabungan dari instansi terkait serta TNI-Polri. Para aparat dihadirkan untuk meredam emosi warga pemilik bangunan liar.

Pembongkaran diawali di garasi milik seorang oknum ASN pejabat eselon III yang bekerja lingkungan Pemkab Karanganyar. Berdasarkan informasi, ia memanfaatkan bangunan ilegal itu untuk garasi selama bertahun-tahun. Surat peringatan agar membongkar mandiri yang dilayangkan sampai tiga kali dari Balai PSDA, tidak diindahkan. Akhirnya, garasi mobilnya diratakan

tanah. Nasib serupa dialami para tetangganya yang juga mendirikan bangunan permanen untuk garasi mobil di depan rumah yang berjarak jalan kampung. Lokasi bangunan liar di atas saluran air daerah irigasi Jetu sepanjang 100-an meter. Tiap garasi berukuran bervariasi.

Kepala UPT Balai PSDA Jawa Tengah, Debby Triasmoro mengatakan bangunan apapun terlarang berdiri di atas saluran irigasi. Apalagi bangunan permanen. "Bangunan itu akan mengganggu fungsi saluran irigasi. Adanya bangunan semacam itu melanggar Perda Provinsi Jateng no 9 tahun

2013 tentang garis sempadan. Maka dari itu harus diterbitkan," tandasnya.

Menurutnya, kondisi seperti itu jamak terjadi di wilayah Jawa Tengah. Tercatat 108 lokasi masuk kategori penertiban segera. "Satu lokasi ada lebih dari satu bangunan. Sudah didirikan tempat usaha, garasi, bahkan tempat tinggal dan ruang publik," jelas Debby.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Jateng Tubayanu menargetkan pembongkaran selesai sehari. Terdapat sembilan bangunan di sana. Pemberisan material sisa bongkaran dapat dikerjakan satuan kerja PSDA. **(Lim)-f**

HUKUM

DARI PATI KE PURWOKERTO

Puluhan Napi Nakal Dipindahkan

PATI (KR) - Puluhan narapidana kasus narkoba yang nakal di lapas kelas IIB Pati dipindahkan ke Lapas kelas IIA Purwokerto. Pemindahan dilakukan untuk mengurung indikator peredaran narkoba.

"Napi dengan kategori nakal, karena hukumannya lebih dari 5 tahun. Serta, mereka banyak malas dikamar, dan tidak pernah mau mengikuti pembinaan selama di Lapas Pati," ungkap Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kelas 2B Pati Jawa Tengah, Mu'alim, Kamis (4/7).

Dikatakan, pemindahan napi narkoba juga sesuai permohonan dari Lapas 2A Purwokerto. "Napi yang dipindahkan karena dinilai bermasalah. Karena tidak pernah mengikuti kegiatan. Atau hanya bermalas-

malasan saja," jelasnya.

LP Kelas IIB Pati, pada Juni lalu memindahkan 6 napi kategori bermasalah ke Nusakambangan. Kemudian pada Juli awal ini, dipindahkan lagi sebanyak 18 napi ke Lapas 2A Purwokerto. Sehingga jumlah napi narkoba yang masih di Lapas kelas 2B Pati, dari semula 394 orang, sekarang tinggal tersisa 85 orang.

Untuk pemindahan napi narkoba, diperlukan protokol khusus. Hal ini disebabkan, napi narkoba perlu pengawasan yang lebih ketat. Mu'alim menegaskan, sebenarnya Lapas Pati tidak gampang memindahkan napi narkoba ke LP lain. "Sepanjang seorang napi selalu berkelakuan baik dan ikut pembinaan, maka akan dipertahankan di LP Pati," tuturnya. **(Cuk)-f**

KASUS PEMBUNUHAN DI KAMAR KOS
Pelaku Diharapkan Segera Tertangkap

PATI (KR) - Pihak keluarga korban berharap agar pelaku pembunuhan seorang perempuan di sebuah rumah kos daerah Randukuning Kelurahan Pati Lor, bisa segera ditangkap. "Kami berharap pelaku agar bisa ditemukan. Biar kami tahu siapa pelakunya, dan motifnya apa?," harap kakak ipar korban, Mustaqim, Kamis (4/7).

Kasus pembunuhan seorang perempuan di sebuah rumah kos Randukuning Kelurahan Pati Lor, terjadi Sabtu (29/6) lalu. Belakangan diketahui, korban bernama Yulaikha (30) warga Trangkil. Berdasar hasil otopsi, pada tubuh korban ditemukan luka bekas tusuk sekitar perut dan bekas jeratan di leher.

Mustaqim memperkirakan pelaku sengaja datang untuk melakukan perbuatan keji. Hanya saja, pelaku tidak profesional sebab dari aneka barang yang ada dikamar kos, ternyata hanya handphone milik korban saja yang dibawa pelaku.

Menurutnya, banyak barang bukti yang masih berada dikamar kos. Seperti pisau dan kabel kipas yang digunakan untuk membunuh. Ada sidik jarinya juga, dan ada CCTV. "Dari HP korban yang dibawa tersangka, seharusnya bisa dilacak," tambah Mustaqim.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol M Alfian Armin, menyatakan masih belum

bisa mengidentifikasi pelaku pembunuhan di kamar kos Randukuning. Pihaknya sudah memeriksa 10 orang saksi, terdiri dari keluarga korban, pacar yang menemukan korban pertama kali, pengelola kos hingga penghuni kos lainnya.

Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga tengah menganalisis rekaman CCTV yang terpasang di rumah kos tersebut. Hal ini untuk mengidentifikasi pelaku.

Sementara itu, tempat kos Randukuning Pati Lor tersebut, dikenal bersih, dan mewah karena berAC, sehingga sangat laris. Penyewa kamar datang dan pergi. Harga kamar kos perbulan di tempat tersebut, berkisar Rp 700 ribu dengan fasilitas kipas. Sementara Rp 1 juta keatas dengan fasilitas AC, kamar mandi dalam, kasur, almari, TV, dan wifi. Namun sejak terjadi kasus tersebut, suasana tempat kos tersebut ada yang berubah. Semula kosnya gelap, sekarang pada malam hari, lampunya menyala.

Sebagaimana diberitakan, kejadian pembunuhan di Randukuning tersebut, merupakan yang keempat dalam bulan Juni 2024. Sebelumnya, terjadi kasus pembunuhan di desa Ronggo kecamatan Jaken. KA (21) tega membunuh mantan pacarnya RP alias Dita, karena mendengar kabar akan menikah dengan pria lain, Selasa (4/6). **(Cuk)-f**

Anak Balita Dibuang Sang Ibu

BANYUMAS (KR) - Anak balita berinisial Afn umur (4) warga Kelurahan Pasir Muncang Purwokerto Barat Banyumas, Kamis (4/7) sekitar pukul 01.30, ditemukan warga di salah satu pertokoan di Desa Banjarsari Kidul Sokaraja Banyumas.

Balita itu diduga sengaja dibuang oleh ibunya di emperan pertokoan di Desa Banjarsari Kidul. Tidak lama kemudian anak balita itu ditemukan Aji (45) warga setempat. Saat ditemukan anak balita dalam kondisi terlelap tidur ada dugaan sebelumnya sudah diminumi obat tidur.

Aji warga setempat yang menemukan anak balita terus mengangkat dan melaporkan kejadian itu perangkat desa setempat, Bhabin-kamtibmas yang diteruskan ke Polsek Sokaraja.

Kapolsek Sokaraja, AKP Sutrisno, saat dikonfirmasi menjelaskan setelah menerima informasi penemuan anak balita langsung menyebarkan informasinya ke media sosial. Kemudian Kamis (4/7) sekitar pukul 10.30, Arf (45) orangtua bocah tersebut warga Kelurahan Pasir Muncang Purwo-

kerto Barat mendatangi ke Desa Banjarsari Kidul untuk menjemputnya.

"Setelah kami berkoordinasi dengan Polsek Purwokerto Barat dan Bhabin-kamtibmas ayah Afn datang ke Banjarsari Kidul. Selanjutnya anak balita itu diserahkan bapaknya," jelas AKP Sutrisno.

Ia menambahkan dari keterangan Afn bahwa istrinya yang membawa anaknya itu saat ini sedang tidak harmonis dan sudah 20 hari tidak ketemu, serta tidak tinggal satu rumah.

Diperoleh informasi, ibu Afn saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang lelaki. Mereka sempat ketemuan di objek wisata Menara Pandang Purwokerto.

Proses penjemputan anak oleh ayah dan keluarga bersama anggota Polsek Sokaraja.

KR-Driyanto

LANGGAR DISIPLIN BERAT

Oknum Anggota Polri Disanksi PTDH

WONOSARI (KR) - Seorang oknum anggota Polres Gunungkidul, berinisial FN berpangkat Brigadir dikenai sanksi berat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) lantaran terbukti tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut.

Keputusan PTDH tersebut telah mendapat persetujuan Kapolda DIY dan tertuang dalam surat keputusan bahwa yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran berat. "Atas sanksi yang diterima yang bersangkutan bukan lagi sebagai anggota Polri," jelas Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri SIK, Kamis (4/7).

Dijelaskan, Brigade FN yang semula bertugas di Satsamapta Polres Gunungkidul resmi diberhentikan karena mangkir tidak bekerja selama 90 hari atau tiga bulan berturut-turut. Sejauh ini, pihaknya berupaya adil dengan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang bekerja melayani masyarakat dengan baik, dan memberikan sanksi bagi anggota yang melakukan kesalahan.

Terhadap anggota yang melakukan pelanggaran juga ditindaklanjuti sesuai prosedur perundangan yang berlaku. Terhadap penegakan disiplin tidak tebang pilih. "Terha-

dap anggota yang bersalah tetap diproses sesuai dengan aturan, yang berlaku," imbuhnya.

Pihaknya juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya. Hal ini selain untuk kedisiplinan, juga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pengawasan terkait absen atau kehadiran dalam kedinasan mulai pagi dan sore, hingga pengawasan kepada anggota yang sedang bertugas.

"Mekanismenya setiap hari melakukan penugasan, dan terhadap anggota yang melanggar akan dikenai sanksi," ujarnya. **(Bmp)-f**